BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Mekanisme pengambilan keterangan saksi dalam perkara pidana di pengadilan dimulai atau diawali dengan pemeriksaan keterangan saksi. Prioritas pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan yaitu terhadap keterangan saksi korban, saksi fakta, saksi yang mendengarkan (*testimonium de auditu*). Sedangkan kewajiban untuk menghadirkan seorang saksi dimuka persidangan dibebankan kepada jaksa penuntut umum dan kepada penasihat hukum ataupun terdakwa. Dalam hal ini majelis hakim menanyakan kepada saksi bagaimanakah cara mereka bersumpah dalam kesehariannya atau jika tidak jelas tata cara bersumpahnya maka majelis hakim akan mengatur tata cara sendiri dengan menyesuaikan pada saksi tersebut.

5.1.2. Keterangan seorang saksi yang tidak disumpah tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim selama keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP yang secara garis besar mengharuskan adanya sumpah dalam setiap pemeriksaan keterangan saksi di muka persidangan, Pengucapan sumpah tersebut sangat mutlak dan terdapat pada Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak

dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

5.2. Saran

5.2.1. Perlu adanya regulasi pertauran PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai tatacara pemeriksaan saksi dimuka persidangan, mengingat KUHAP yang digunakan sudah cukup usang untuk digunakan sebagai dasar acuan Hukum Acara Pidana di Indonesia, serta pengaturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan yang terjadi saat ini. Didukung dengan adanya temuan yang dilakukan dilapangan bahwa ada beberapa kasus yang diputuskan sedangkan pada saat pembuktian pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan tidak dengan disumpah, maka hal ini tentu saja akan sangat menghawatirkan bagi para pencari keadilan, yang mana putusan pengadilan tidak lagi menitik beratkan pada keadilan melainkan merupakan sebuah tuntutan masyarakat yang harus segera di putuskan, dengan kata lain lebih mengedepankan kuantitas bukan kualitas.

5.2.2. Keyakinan hakim dalam setiap putusan perkara pidana merupakan syarat yang mutlak untuk digunakan, namun dalam menggunakan keyakinannya tidak ada batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dapat dimungkinkan adanya *dissenting opinion* dalam setiap memutus perkara pidana yang mana putusan perkara pidana yang akan dikeluarkan merupakan titik akhir dari penarikan kesimpulan dari proses pembuktian yang dilakukan di muka persidangan, khususnya berkaitan dengan keabsahan dari seorang saksi yang dimintai keterangan tanpa disumpah

sehingga Putusan yang dihasilkan tidaklah memuat ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan hukum itu sendiri, yaitu Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Maka sangat di harapkan kepada aparaturnya pembuat Undang-Undang untuk sesegera mungkin membuat sebuah regulasi hukum khususnya Peraturan PerUndang-Undangan guna mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dikemudian hari.